

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tingkat pencapaian pembangunan Sumber Daya Manusia merupakan salah satu indikator dari kemajuan pembangunan nasional, dan prioritas dari pembangunan nasional adalah meningkatkan mutu pendidikan. Agar mutu pendidikan di Indonesia lebih berkualitas, perlu adanya dorongan yang nyata dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, karena mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan kewajiban dari setiap Negara.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (1), Pemerintah Indonesia mengamanatkan bahwasanya setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan, agar amanat tersebut dilaksanakan maka pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang Sistem Pendidikan Nasional yang terdapat pada Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 yang menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia.

Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi manusia, dengan sistem pendidikan yang baik, diharapkan akan memunculkan generasi yang berkualitas, sehingga dapat membuat perubahan kearah yang lebih baik untuk kemajuan suatu bangsa.

Salah satu strategi yang diambil pemerintah untuk meningkatkan sistem pendidikan yang bermutu yaitu dengan mengupayakan perluasan dan pemerataan pendidikan untuk setiap warga negara (TAP MPR No.IV/MPR/1999).

Pemerintah Indonesia masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan dalam meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia, baik permasalahan secara internal maupun secara eksternal, seperti kualitas dari pendidik yang belum memenuhi standar, sarana dan prasarana sekolah yang belum memadai serta terbatasnya anggaran pendidikan yang disediakan oleh pemerintah (Staf Ahli Kemendikbud, Prof. Dr. Kacung Marijan)

Pada laporan *World Economic Forum* (WEF) yang bertajuk *The Global Competitiveness Report 2019*, peringkat daya saing Indonesia turun lima peringkat pada tahun 2019, yang semula berada di posisi 45 tahun 2018, menjadi posisi ke 50 di tahun 2019. Dari 12 pilar yang dievaluasi yaitu: (institusi, infrastruktur, adopsi ICT, stabilitas makroekonomi, kesehatan, keterampilan, produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, ukuran pasar, dinamika bisnis, hingga kemampuan inovasi), ada 7 pilar yang mengalami peningkatan (dinamika bisnis, infrastruktur, kemampuan inovasi, institusi, sistem keuangan, stabilitas makroekonomi, dan ukuran pasar), sedangkan 5 pilar lainnya mengalami penurunan (adopsi ICT, kesehatan, keterampilan, produk, pasar tenaga kerja).

Walaupun pendidikan di Indonesia sampai saat ini masih rendah, namun pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yaitu dengan mengalokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sehingga dapat meringankan biaya pendidikan bagi masyarakat.

Dana BOS merupakan penyediaan pendanaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan non personalia pendidikan, dalam melaksanakan program wajib belajar (Permendikbud RI, 2014). Pemerintah Indonesia memberikan dana

bantuan tersebut kepada sekolah untuk membantu semua lapisan masyarakat guna memperoleh pelayanan pendidikan.

Pemerintah Pusat akan memberikan dana BOS kepada sekolah yang telah memenuhi syarat untuk menjadi peserta. Sekolah yang akan menerima program dana Bantuan Operasional ini adalah SD, SMP, dan SMA/SMK. Program dana BOS telah dilaksanakan pada bulan Juli 2005.

Dana BOS yang diterima oleh sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa per sekolah dan pemerintah menyalurkan dana BOS secara per semester atau per triwulan. Dalam mengelola dana BOS, sekolah harus merujuk atau berpedoman kepada Petunjuk Teknis BOS.

Program dana BOS, menuntut sekolah agar dapat merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemerintah dalam mengelola biaya pendidikan agar dapat diketahui secara transparan, dan pengelolaan tersebut akan berpengaruh terhadap mutu pendidikan sekolah, dan keberhasilan program dana BOS. Penggunaan dana BOS baik dari mulai pencatatan, penerimaan, pengeluaran, dan pelaporan keuangan menjadi tanggungjawab sekolah.

Hal utama yang harus dilakukan sekolah dalam merencanakan penggunaan dana BOS, dengan menyusun RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah). RKAS merupakan rencana yang dilakukan sekolah untuk memperoleh dana pembiayaan pendidikan dari berbagai sumber pendapatan. Dalam menyusun RKAS, sekolah perlu memperhatikan asas anggaran, dan dalam menggunakan anggaran, sekolah juga harus memperhatikan asas umum pengeluaran negara.

Bentuk pertanggungjawaban dari program dana BOS, yaitu setiap sekolah diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada pihak pengelola program dana BOS baik kepada tingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Dan yang dilaporkan oleh pelaksana program dana BOS berkaitan dengan statistik penerima bantuan, penyaluran, penyerapan, pemanfaatan dana, pertanggungjawaban keuangan serta hasil monitoring evaluasi dan pengaduan masalah.

Pada umumnya, permasalahan yang terjadi dalam program dana BOS yaitu adanya sekolah yang tidak ingin laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS diketahui oleh masyarakat, sehingga transparansi dan akuntabilitas tidak terlihat (Kaswandi, 2015). Agar penyimpangan dana BOS tidak terjadi, dan pengelolaan dana BOS menjadi efektif, maka diperlukan evaluasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penggunaan sampai dengan pelaporan pertanggungjawaban keuangan dana BOS.

Menurut Mulyasa (2006) “Evaluasi dan pertanggungjawaban keuangan sekolah dapat diidentifikasi ke dalam tiga hal yaitu pendekatan pengendalian penggunaan alokasi dana, bentuk pertanggungjawaban keuangan sekolah, dan keterlibatan pengawasan pihak eksternal sekolah”.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMA dan SMK di Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten Pasaman Barat”**

## 1.2 Rumusan Masalah

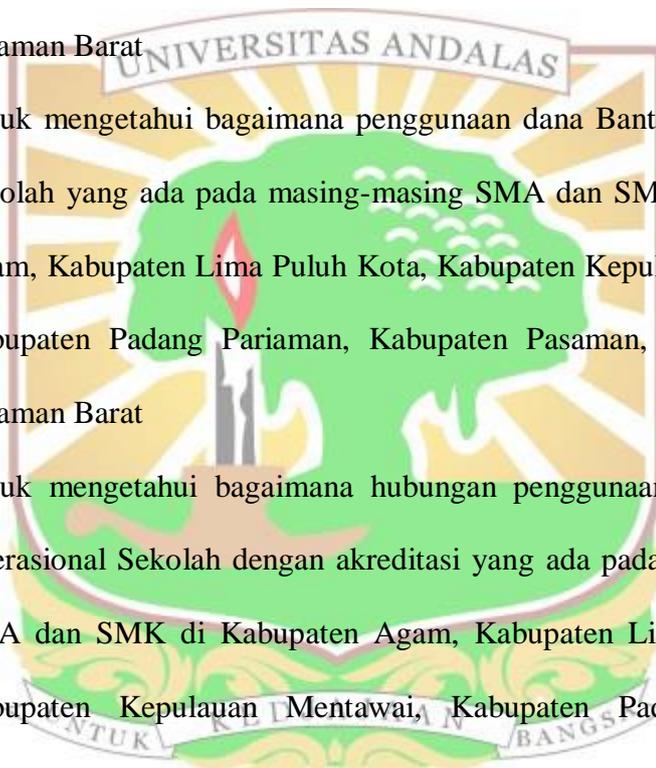
Petunjuk Teknis BOS merupakan petunjuk yang dibuat oleh pemerintah, yang digunakan sebagai alat dalam mengelola dana BOS, agar tujuan dari penggunaan dana BOS dapat tercapai. Dari uraian mengenai latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perbandingan dana BOS yang disalurkan dengan dana BOS yang digunakan SMA dan SMK baik yang telah terakreditasi maupun belum terakreditasi pada Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten Pasaman Barat?
2. Bagaimana penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah yang ada di SMA dan SMK di Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten Pasaman Barat?
3. Bagaimana hubungan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah dengan akreditasi yang dimiliki SMA dan SMK di Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten Pasaman Barat?
4. Bagaimana tingkat efektivitas penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah pada masing-masing SMA dan SMK di Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten Pasaman Barat?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

- i. Untuk mengetahui perbandingan dana BOS yang disalurkan dengan dana BOS yang digunakan SMA dan SMK baik yang telah terakreditasi maupun yang belum terakreditasi pada Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten Pasaman Barat
- ii. Untuk mengetahui bagaimana penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah yang ada pada masing-masing SMA dan SMK di Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten Pasaman Barat
- iii. Untuk mengetahui bagaimana hubungan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah dengan akreditasi yang ada pada masing-masing SMA dan SMK di Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten Pasaman Barat
- iv. Untuk mengetahui bagaimana tingkat efektivitas penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah yang ada pada masing-masing SMA dan SMK di Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten Pasaman Barat.



## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan bisa dijadikan sebagai bahan rujukan pada penelitian selanjutnya dalam kajian yang sama.

2) Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti Sendiri

Peneliti dapat mengetahui mengenai pengelolaan dana BOS SMA dan SMK, serta dapat menerapkan ilmu selama kuliah

b) Bagi Pemerintah

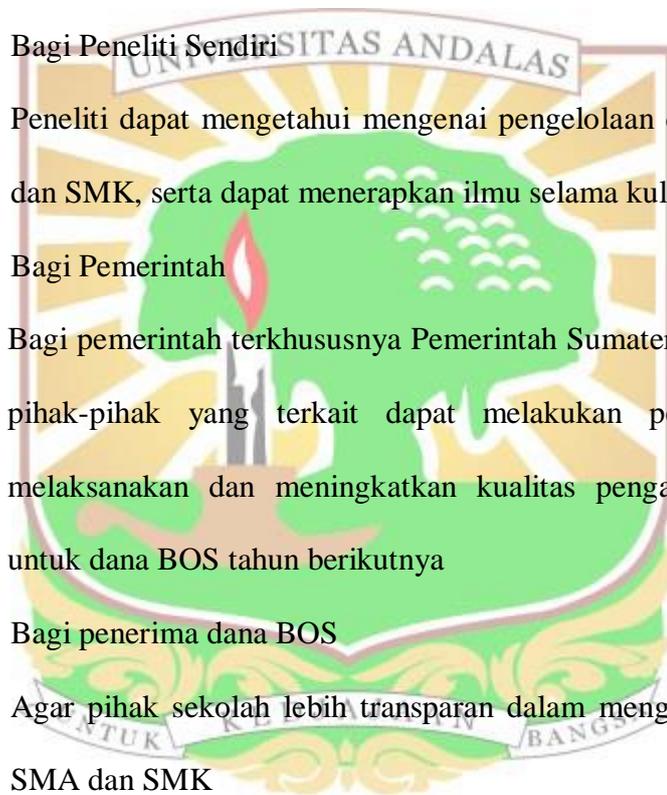
Bagi pemerintah terkhususnya Pemerintah Sumatera Barat maupun pihak-pihak yang terkait dapat melakukan perbaikan dalam melaksanakan dan meningkatkan kualitas pengawasan program untuk dana BOS tahun berikutnya

c) Bagi penerima dana BOS

Agar pihak sekolah lebih transparan dalam mengelola dana BOS SMA dan SMK

d) Bagi masyarakat

Agar masyarakat juga dapat menganalisis mengenai pengelolaan dana BOS SMA dan SMK apakah sudah wajar atau belum.



### **1.5 Batasan Penelitian**

Batasan penelitian digunakan untuk menghindari terjadinya penyimpangan ataupun pelebaran terhadap pokok masalah yang akan dibahas, dengan tujuan agar penelitian dapat lebih terarah. Agar tujuan dari penelitian ini dapat tercapai dan lebih terarah maka penelitian ini memiliki keterbatasan dalam cakupan daerah penelitian.

Pada penelitian kali ini, hanya dilakukan pada 6 (enam) Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat diantaranya yaitu Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten Pasaman Barat

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan digunakan untuk memudahkan dalam pembahasan penelitian, sistematika penulisan pada skripsi yaitu:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab II Landasan Teori berisi tentang kajian-kajian teoritis dan penelitian terdahulu, yang digunakan dalam pembuatan dan perancangan skripsi

### BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, penulis mengemukakan metode dalam penelitian yang meliputi jenis penelitian, objek penelitian, dan teknik pengumpulan data diuraikan pada bab tiga.

### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis menguraikan hasil pembahasan mengenai hal yang diteliti oleh penulis.

### BAB V PENUTUP

Pada bab ini, penulis menguraikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

